



MEDIASI

BI tambah cadangan devisa

PURWAKARTA: Bank Indonesia menyiapkan penambahan komoditas emas sebagai bagian dari pencadangan devisa pada tahun ini.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengungkapkan bank sentral selalu menggelar pembelian emas secara bertahap.

"Kami berhati-hati untuk masuk ke pasar. Pasar pasti mendengar kalau bank sentral membeli emas karena jumlahnya besar," ujarnya, akhir pekan lalu.

Dia menuturkannya bank sentral juga menyiapkan yen Jepang, euro, dan sejumlah mata uang lainnya sebagai bagian dari cadangan devisa.

Halim juga mengungkapkan jumlah cadangan devisa di Tanah Air telah mencapai level US\$101,8 miliar. "Sejumlah analisis telah memperkirakan jumlah cadangan devisa mencapai US\$120 miliar sampai dengan akhir tahun ini." (BISNIS/MMH)

Obligasi Bank Sulsel diserap

MAKASSAR: PT Bank Papua dan PT Bank DKI akan membeli obligasi yang diterbitkan oleh PT Bank Sulsel pada awal Mei 2011.

Direktur Utama Bank Sulsel Ellong Tjandra mengatakan dua bank pembangunan daerah itu telah menyampaikan minat pembelian obligasi senilai Rp200 miliar.

Bank Sulsel siap melakukan emisi surat utang senilai Rp500 miliar yang akan digunakan untuk penguatan kredit dan ekspansi jaringan kantor secara organik.

"Bank Papua akan menjadi pembeli obligasi kami, karena mereka sudah memesan sebesar Rp140 miliar. Bank DKI memesan sekitar Rp60 miliar," kata Ellong, kemarin. (BISNIS/K46)

BI gandeng Kemendiknas

JAKARTA: Bank Indonesia akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional untuk memasukkan pengetahuan perencanaan keuangan dalam kurikulum sekolah dasar.

Peneliti Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Anto Prabowo mengatakan pembicaraan itu terus dilakukan Gubernur BI dan Mendiknas.

"Kami berharap hal itu dapat diluncurkan pada hari pendidikan nasional 2 Mei mendatang," ujarnya pekan lalu.

Menurut dia, perencanaan keuangan bagi siswa sekolah dasar akan dilakukan dari hal dasar, seperti manfaat menabung.

Selain itu, definisi bank dan cara menghitung keuntungan dari menabung. (BISNIS/20)

Kredit perbankan naik 24,6%

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Bank Indonesia mencatatkan pertumbuhan kredit perbankan sebesar Rp6,6 triliun hingga akhir Februari 2011, naik 24,6% dibandingkan dengan tahun lalu, sehingga total penyaluran kredit perbankan mencapai Rp 1.772,4 triliun.

Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Wimboh Santoso mengatakan penyaluran kredit oleh perbankan sudah kembali normal setelah terjadi penurunan pada awal tahun.

"Siklus tahunan atau *January effect* yang menyebabkan kredit turun sudah mulai hilang. Kredit perbankan akan menunjukkan kenaikan," katanya akhir pekan lalu.

Meski demikian, Wimboh mengatakan dari sisi perolehan dana pihak ketiga (DPK) terjadi penurunan dibandingkan dengan pekan sebelumnya.

Wimboh menyebutkan DPK perbankan secara tahunan tumbuh 17,9% atau sebesar Rp64,7 triliun, sehingga total perolehan DPK perbankan hingga akhir Februari 2011 tercatat mencapai Rp2.403,5 triliun.

"Penurunan DPK itu terjadi, karena dana masyarakat 'lari' untuk pembayaran pajak," jelasnya.

Wimboh memaparkan perolehan DPK perbankan diproyeksikan tumbuh 15% pada tahun ini dibandingkan dengan realisasi 2010. Angka pertumbuhan tersebut, kata dia, mengacu pada rencana bisnis bank (RBB) industri perbankan pada tahun ini.

Selain itu, Wimboh mengatakan perbankan na-

sional dihadapkan pada tantangan terkait dengan rendahnya tingkat efisiensi yang tampak dari besarnya biaya operasional-pondapapan operasional (BOPO).

Biaya operasional

Adapun, BOPO perbankan saat ini 88,6%, tertinggi dibandingkan dengan sejumlah negara a.l. Filipina 74%, Thailand 54,3%, Singapura 42%, dan Malaysia berada pada posisi terendah 40%.

"Tingginya BOPO itu menunjukkan efisiensi perbankan masih kurang, sehingga bank harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi guna menekan BOPO," ujarnya.

Di sisi lain, besarnya potensi kalangan mapan di Indonesia mendorong perbankan melirik kalangan itu dengan menggarap produk di bawah standar saldo *priority banking* dengan tetap memberikan pelayanan yang eksklusif.

Salah satu bank yang mengincar kalangan mapan, yaitu Standard Chartered dengan program *preferred banking* yang diluncurkan pada akhir pekan lalu.

General Manager Premium Banking Standard Chartered Djumariah Tenteram mengatakan program ini bisa dinikmati oleh nasabah dengan investasi minimal Rp150 juta.

Menurut dia, selama ini perbankan hanya memberikan layanan prioritas kepada nasabah kaya dengan investasi di atas Rp500 juta. Perbankan melupakan kalangan mapan, yaitu kalangan setingkat di bawah nasabah kaya. (07/20)

Arah kebijakan moneter masih ketat

BI Rate dipatok tetap 6,75%

OLEH HENDRI T. ASWORO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Bank Indonesia mengindikasikan arah kebijakan moneter ke depan cenderung ketat, menyusul ekspektasi inflasi yang tinggi, meskipun suku bunga acuan diputuskan tetap pada level 6,75%.

Salah satu upaya kebijakan moneter yang akan ditempuh bank sentral, yaitu membiarkan apresiasi nilai tukar rupiah guna mengantisipasi dampak inflasi dari barang impor akibat lonjakan harga komoditas.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan keputusan BI Rate tetap pada level 6,75% itu tidak mengubah arah kebijakan moneter BI yang cenderung ketat, terkait dengan upaya pengendalian tekanan inflasi yang masih tinggi.

"BI masih terus mewaspadai perkembangan inflasi ke depan dan menyesuaikan dengan tingkat BI Rate secara terukur," ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Dia menjelaskan upaya pengendalian inflasi, khususnya tekanan inflasi impor, tersebut menyoroti kenaikan harga komoditas global dan penguatan nilai tukar rupiah sejalan dengan perbaikan kondisi fundamental ekonomi global.

Namun, dia menyampaikan bank sentral tak sepenuhnya melepas penguatan rupiah agar

nilai tukar dan produk ekspor nasional masih kompetitif dengan negara tetangga lainnya.

"Capital inflow masih berjalan dan kami membiarkan sedikit [melegat], tetapi hal itu tidak dilepaskan. Tetap di bawah kendali, intervensi kami tetap berjalan, sehingga rupiah menguat tidak terlalu ekstrim," tuturnya.

Darmin memaparkan tekanan inflasi yang semakin tinggi tidak hanya dihadapi negara berkembang, tetapi juga dihadapi negara maju.

Adapun, pengetatan kebijakan moneter tidak hanya terjadi di negara berkembang saja, tetapi mulai diikuti oleh negara maju.

Menurut dia, langkah pengendalian likuiditas melalui penerapan kebijakan makroprudensial dan operasi moneter juga terus diperkuat dengan tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas perbankan yang sehat, selain sisi

nilai tukar dan suku bunga.

Hal itu seiring dengan pemberlakuan ketentuan giro wajib minimum (GWM) yang dikaitkan dengan rasio kredit terhadap dana (*loan to deposit ratio/LDR*) dan GWM valuta asing per 1 Maret 2011.

Analisis perbankan Mirza Adityaswara menuturkan BI memahami tekanan inflasi ke depan masih ada, terutama akibat peningkatan harga komoditas dan permintaan dalam bentuk inti inflasi yang juga sedikit meningkat.

"BI berusaha untuk mengendalikan inflasi dengan menggabungkan BI Rate dan apresiasi rupiah, jadi apresiasi rupiah dalam 1 bulan ini dilepas oleh BI," tuturnya.

Dia berpendapat apresiasi nilai tukar memberikan efek meredakan kenaikan harga. "Dengan ekonomi yang sedikit

melambat, kenaikan harga barang mereda, sedangkan apresiasi mendorong harga barang impor menjadi lebih murah. Harga barang nonimpor tidak terpengaruh secara langsung," kata Mirza.

Darmin menambahkan pihaknya menilai upaya memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah sangat penting dalam pengendalian inflasi.

Pasalnya, risiko tekanan inflasi masih tinggi, terutama dari tingginya harga komoditas internasional dan rencana pengurangan subsidi BBM.

"Koordinasi kebijakan tersebut merupakan bagian penting dari pengendalian bagi stabilisasi harga secara bersama-sama oleh BI dan pemerintah, termasuk melalui forum Tim Pengendalian Inflasi di tingkat pusat maupun daerah," tuturnya.

Pada Februari 2011, inflasi sedikit menurun, tetapi risiko tekanan inflasi ke depan masih cukup tinggi. Inflasi pada Februari 2011 mencapai 0,13% secara bulanan atau 6,84%, menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Namun, Darmin menyampaikan pihaknya terus mewaspadai kenaikan inflasi kelompok inti yang mulai meningkat yakni tercatat sebesar 0,31% (bulanan) atau 4,36% (tahunan), terutama yang selama ini dipengaruhi oleh peningkatan inflasi *volatile foods* dan kenaikan harga komoditas internasional.

Indikator ekspektasi inflasi di pasar keuangan mulai menurun, sedangkan ekspektasi inflasi di kalangan produsen, pedagang, dan konsumen belum banyak terpengaruh.

Bank Indonesia mengakui ketatnya likuiditas sejumlah bank nasional merupakan akibat pemberlakuan sejumlah kebijakan baru yang diarahkan guna menyerap kelebihan dana perbankan.

Namun, bank sentral optimistis kredit perbankan terus tumbuh, meski likuiditas ketat.

"Sejumlah kebijakan sudah mulai efektif, misalnya GWM [giro wajib minimum] valas, LDR [*loan to deposit ratio*]. Bank yang sedang menambah GWM berarti likuiditas berkurang," kata Darmin.

Melalui kenaikan GWM valas tersebut, BI berharap dapat menyerap likuiditas perbankan dalam mata uang asing sebesar US\$3,3 miliar. (07) (hendri.asworo@bisnis.co.id)

BRI finalkan obligasi Rp5 triliun

OLEH M. MUNIR HAIKAL
Bisnis Indonesia

PURWAKARTA: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk memfinalkan rencana penerbitan obligasi subordinasi senilai Rp3 triliun hingga Rp5 triliun pada tahun ini.

Direktur BRI Ahmad Baiquni mengungkapkan aksi korporasi tersebut sudah masuk dalam rencana bisnis bank. "Kami tidak buru-buru merealisasikan rencana penerbitan obligasi subordinasi itu. Kalau situasi pasar bagus dan kami perlu dana untuk pertumbuhan anorganik, rencana ini kami realisasikan," ujarnya kema-

ri kemarin.

Berdasarkan aturan Bank Indonesia, sebanyak 50% dari hasil penerbitan obligasi subordinasi bisa diperhitungkan sebagai tier II modal bank.

Baiquni menuturkan BRI tetap berminat untuk membeli bank untuk mendukung pertumbuhan anorganik. BRI baru menuntaskan akuisisi PT Bank Agroniaga Tbk.

Adapun, BRI sebenarnya berminat untuk membeli 15% saham PT Bank Bukopin Tbk melalui penawaran saham terbatas yang digelar oleh bank tersebut. Namun, rencana BRI itu batal, terkait dengan keputusan peme-

gang saham Bank Bukopin.

Selanjutnya, BRI berencana menambah sekitar 400 Teras BRI pada tahun ini. Teras BRI adalah kantor kas perseroan yang mengincar segmen pasar tradisional dengan menggunakan sistem jemput bola.

Ahmad mengungkapkan langkah itu ditempuh oleh perseroan untuk menghadang gerakan sejumlah bank yang dimiliki investor asing yang masuk ke sektor kredit mikro.

Sejumlah bank telah mengincar kredit mikro, a.l. PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Hingga Februari 2011, jumlah Teras BRI telah mencapai sekitar 800 teras.

Tahun ini, kami berencana menambah 400 Teras BRI. Lokasi yang kami incar untuk Teras BRI adalah pasar tradisional di kota-kota besar, ujarnya.

Dia menuturkan perseroan saat ini juga mengincar segmen korporasi dengan membidik sektor infrastruktur.

Baiquni menjelaskan penetrasi pembiayaan sektor infrastruktur dilakukan untuk memanfaatkan kapasitas pendanaan BRI.

"Lebih baik kami mendanai sektor infrastruktur yang me-

nawarkan margin lebih besar daripada ke sertifikat Bank Indonesia."

Sektor infrastruktur

Dia mengakui ada masalah *maturity mismatch*, karena jangka waktu pendanaan sektor infrastruktur di atas 5 tahun dengan simpanan nasabah di BRI, berupa tabungan dan giro yang bisa dicairkan sewaktu-waktu.

Namun, berdasarkan data, tabungan nasabah mempunyai kecenderungan mengendap dan cenderung diambil oleh nasabah yang melampaui jangka waktu deposito.



BISNIS/ENDANG MUCHTAR

PENGIRIMAN UANG:

(Dari Kiri) Direktur Bank Muamalat Farouk A. Alwyni, bersama dengan Dirut Arvian Arifin mendengarkan pembicaraan Managing Director Bank Islam Malaysia Berhad Dato Sri Zukri Samat, disaksikan oleh Chief Financial Officer Makit Singh Maan, sesuai penandatanganan kerja sama di Jakarta, akhir pekan lalu. Bank Muamalat merangkul Bank Islam Malaysia Berhad guna transaksi pengiriman uang dari 113 kantor di penjuru Malaysia.

BI tolak usulan perhitungan SUN dalam rasio kredit

OLEH M. MUNIR HAIKAL
Bisnis Indonesia

PURWAKARTA: Bank Indonesia mengisyaratkan akan menolak usulan perbankan agar pembelian surat utang negara dikategorikan dalam perhitungan rasio kredit terhadap simpanan (*loan to deposit ratio/LDR*).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah menilai apabila kebijakan tersebut diterapkan, ekspansi kredit justru dikawatirkan tidak berjalan.

"Kalau pembelian obligasi pemerintah masuk dalam perhi-

tungan LDR, kami khawatir ekspansi kredit tidak berjalan," ujarnya kemarin.

VP Chief Economist PT Bank Negara Indonesia Tbk Ryan Kiryanto menilai pembelian surat utang negara (SUN) oleh perbankan akan membantu pemerintah dan mendukung pembangunan.

"Pemerintah menggunakan dana hasil penerbitan SUN untuk mendukung pembangunan. Kalau perbankan membeli SUN sebenarnya ikut mendukung pembiayaan pembangunan," tuturnya.

Dia menilai secara tidak langsung dana tersebut mendukung

pembangunan dan berfungsi sama dengan ekspansi kredit. "Lebih baik pembelian SUN oleh perbankan masuk dalam perhitungan LDR."

Mulai bulan ini, BI telah menerapkan kebijakan LDR bank berada pada level 78% hingga 100% yang dikaitkan dengan giro wajib minimum (GWM).

BI mengenakan kewajiban bagi GWM sebesar 0,1% dari dana pihak ketiga rupiah untuk setiap kekurangan 1% LDR.

Apabila LDR melebihi 100% dan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) kurang

dari 14%, BI mengenakan kewajiban tambahan GWM. Namun, BI tidak mengenakan tambahan GWM apabila CAR lebih besar atau minimal setara dengan 14%.

Bank asing

Halim mengatakan BI menilai bank asing memiliki kecenderungan aktif dalam perdagangan portofolio. Porsi kredit bank asing juga memiliki kecenderungan porsi kredit yang rendah.

Dia mengungkapkan penempatan bank asing di surat berjangka mencapai Rp2,58 triliun pada 2005 dan melonjak menjadi

Rp7 triliun pada akhir 2010.

"Bank asing juga aktif sebagai *net* peminjam di pasar uang antar bank [PUAB], sedangkan bank campuran mempunyai kecenderungan kurang aktif dalam mobilisasi dana pihak ketiga [DPK]," ujarnya.

Dia menuturkan BI menilai kelompok bank campuran memiliki porsi modal paling tinggi dan porsi DPK terendah, sehingga lebih tidak berisiko. Modal bank campuran pada akhir 2005 mencapai Rp11,59 triliun dan melonjak menjadi Rp59,97 triliun pada akhir 2010.